

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ariman, R. dan Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua, Eresco, Bandung.
- Beirne, P. dan Messerschmidt, J. (1995). *Criminology*, second edition, Hardcourt Brage College Publisher.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- _____. (2007). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Dewata, M.F.N. dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Depok.
- Effendi, E. (2021). *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Enschede, Ch.J. (2002). *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer.

- Fletcher, G.P. (2000). *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, Inggris.
- Hagen, F.E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, edisi ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. (2008). *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, E.O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Jonkers, J.E. (1946). *Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden.

- Krisnawati, D., Hiariej, E.O.S., Gunarto, M.P., Riyanto, S., dan Supriyadi.
(2006). *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena: Ilmu dan Amal, Jakarta.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Manan, B. (2006). *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia: Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke-XII No. 253*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi Cetakan ke-5*, Kencana, Jakarta.
- _____. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi Cetakan ke-15*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- _____. (2006). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- _____. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Nessa, R. (2016). *Putusan Hakim Sebagai Wadah Pembaharuan Hukum dalam Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Paton, G.W.A. (1951). *Textbook of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford.
- Poernomo, B. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pompe, W.P.J. (1959). *Handboek Van Het Nederlandsce Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Purwoleksono, D.E. (2015). *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal; Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samosir, D. (2018). *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Simons, D. (1937). *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.-Groningen-Batavia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sunandar, N. (2021). *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Tirtaamidjaja, M.H. (2003). *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- van Apeldoorn, L.J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- van Bemmelen, J.M. En Burgersdijk, H. (1959). *Arresten Over Strafrecht*, Vijfde Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.
- van Bemmelen, J.M., En van Hattum, W.F.C. (1953). *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon, Arnhem.
- van Hamel, G.A. (1913). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem and Gebr. Belinfante's-Gravenhage.
- Vos, H.B. (1950). *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene-Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem.
- Widiarty, W.S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Yudisial Republik Indonesia, Komisi. “Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

B. ARTIKEL JURNAL

- Ahmad, Nur Aina. (2017). Problematika Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 1(1): 128-144.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/289>
- Arifin, Ida Nurlaela. (2024). Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(3): 68-75
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674>
- Fahmiron. (2016). Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Litigasi*. 17(2): 3467-3516.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>
- Fatoni, Syamsul. dkk. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 32(1): 46-71.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Latipulhayat, Atip. (2017). Editorial: Due Process of Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. 2(2): 1-5. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a0>
- Nur, Zulfahmi. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), *MISYKAT*

AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT, 6(2):
247-272. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>

Ramelan. (2009). Kasasi terhadap Putusan Bebas. *Jurnal Hukum Proris*.
2(3): 148-160. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i3.333>

Ratu, Dian dan Doramia, Anggita Lumbanraja. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*. 7(2): 232-245.
<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>

Ningrum, Hesti Widya. (2018). Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. *Volksgeist*. 1(2): 139-155.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1633>

Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*. 7(2): 192-205.
<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>

C. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Andini, S.N. (2024). “Analisis Yuridis Perbuatan Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana (Perbandingan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.YYK dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.SGR)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

Candra, B. (2021). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”,

Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.

Hardianti. (2021). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar.

Heryani, W. (2008). “Hakikat dan Kedudukan Hukum Dissenting Opinion Bagi Kemandirian Hakim di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Lestari, S.D. (2008). “Penerapan *Dissenting Opinion* Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1951: 3 Halaman).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta, 1993.

E. PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 606 K/Pid.Sus/1984.

Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 2655 K/Pid.Sus/2018.

Pengadilan Negeri Lamongan, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg.

Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lmg.

F. INTERNET

Dhikshita, I.B.G.P.A. “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

dan Mashab Positivisme di Indonesia”,

[https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-](https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/)

[gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/](https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/), diakses

pada 1 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kejahatan”,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan>, diakses pada 18

Februari 2025.

Khuluq, M.K. “Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem

Hukum Positif”,

[https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ)

[substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ), diakses

pada 1 Oktober 2025.

Kompas.com, “7 Pemberontakan di Awal Kemerdekaan Bangsa Indonesia”,

[https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/18/060000279/7-](https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/18/060000279/7-pemberontakan-di-awal-kemerdekaan-bangsa-indonesia?page=all)

[pemberontakan-di-awal-kemerdekaan-bangsa-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/18/060000279/7-pemberontakan-di-awal-kemerdekaan-bangsa-indonesia?page=all),

diakses pada 18 Februari 2025.

Millis, S. “Purposive Approach to Charter Interpretation”,
<https://www.constitutionalstudies.ca/2020/07/purposive-approach-to-charter-interpretation/>, diakses pada 1 Oktober 2025.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, dalam pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada di Sitihiinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

Munawaroh, N. “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, diakses pada 1 Oktober 2025.

Oktavira, B.A. “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses pada 29 Oktober 2025.

Pakpahan, N.H. “Ketua Kamar Pidana: Pertimbangan Hakim Harus Sesuai dengan Peraturan Berlaku”,
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pertimbangan-hakim-harus-sesuai-dengan-peraturan-berlaku-0s5>, diakses pada 1 Oktober 2025.

Prahassacitta, V. “Memahami Putusan Bebas dan Lepas”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/memahami-putusan-bebas-dan-lepas/>, diakses pada 14 Januari 2025.

Pujiati, “Penulisan “Atau” dan Kata Lain Yang Bisa Digunakan”, <https://penerbitdeepublish.com/penulisan-atau/>, diakses 29 Oktober 2025.

Sanjaya, A.W. “Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-diferensiasi-fungsional-dalam-hukum-acara-pidana-lt62102ecf9616b/>, diakses pada 29 Oktober 2025.

Sidabutar, D.T. “Perbedaan dan Persamaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-surat-dakwaan-dengan-surat-tuntutan-lt4c71f536dd157/>, diakses pada 1 Oktober 2025.

Sudrajat, W. “Relativitas Peraturan dalam Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/relativitas-peraturan-dalam-hukum-lt60e5205a1d473/>, diakses pada 29 Oktober 2025.

Wahyuni, W. “Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/>, diakses pada 17 Februari 2025.

Yasin, M. “Motivering dan Putusan yang Dinyatakan Pertimbangannya Kurang Lengkap”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt678d47e664c88/mo>

tivering-dan-putusan-yang-dinyatakan-pertimbangannya-kurang-lengkap/, diakses pada 1 Agustus 2025.

